



# **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

## **PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

**NOMOR: 5 TAHUN 2019**

**TENTANG**

### **STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin tercapainya akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai sasaran dan prioritas pembangunan daerah bidang kesehatan, diperlukan pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah. ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 Nomor 9 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2 );
11. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 80 ).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

2. Indikator. ...

2. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM.
3. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
4. Jenis Pelayanan adalah setiap bentuk pelayanan publik yang mutlak dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak dalam kehidupan.
5. Indikator Pelayanan adalah ukuran yang menggambarkan pencapaian sasaran dari Jenis Pelayanan.
6. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai.
7. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan penunjang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
11. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
13. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
14. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
15. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
16. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB II  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 2

SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyediaan pelayanan kesehatan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan.
- (2) SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan SPM wajib.
- (3) Ketentuan lebih lanjut SPM Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati Ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung

pada tanggal 7 Januari 2019

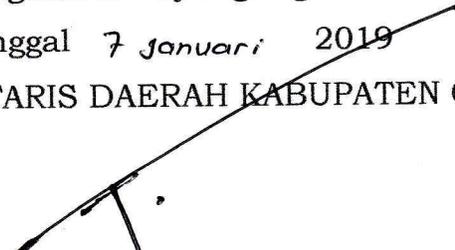
/s/ BUPATI OGAN KOMERING ILIR, /s/

  
/s/ ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung

pada tanggal 7 Januari 2019

/s/ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, /s/

  
HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019 NOMOR ...

BAB II  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

## Pasal 2

SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyediaan pelayanan kesehatan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

## Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan.
- (2) SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan SPM wajib.
- (3) Ketentuan lebih lanjut SPM Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati Ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 4

Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

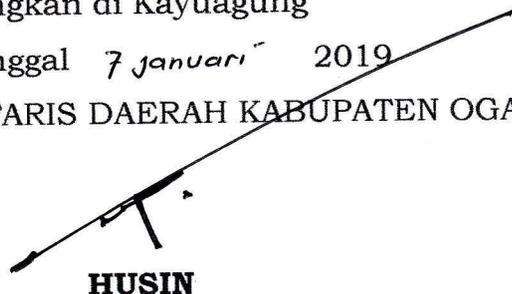
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 7 Januari 2019  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 7 Januari 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,



**HUSIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019 NOMOR .5

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 5 TAHUN 2019

TANGGAL: 7 Januari 2019

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)  
BIDANG KESEHATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

No	Jenis layanan dasar	Mutu layanan dasar	Penerima layanan dasar	Pernyataan standar	Target
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Sesuai standar pelayanan antenatal.	Ibu hamil.	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.	100%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan.	Ibu bersalin.	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir.	Bayi baru lahir.	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%
4	Pelayanan kesehatan balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita.	Balita.	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar.	Anak pada usia pendidikan dasar.	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif.	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun.	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut.	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas.	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi.	Penderita hipertensi.	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 5 TAHUN 2019

TANGGAL: 7 Januari 2019

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)  
BIDANG KESEHATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

No	Jenis layanan dasar	Mutu layanan dasar	Penerima layanan dasar	Pernyataan standar	Targ et
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Sesuai standar pelayanan antenatal.	Ibu hamil.	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.	100%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan.	Ibu bersalin.	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir.	Bayi baru lahir.	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%
4	Pelayanan kesehatan balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita.	Balita.	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar.	Anak pada usia pendidikan dasar.	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif.	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun.	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut.	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas.	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi.	Penderita hipertensi.	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%

9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus.	Penderita Diabetes Melitus.	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa.	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat.	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Sesuai standar pelayanan kesehatan TB.	Orang dengan TB.	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV.	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan).	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.	100%

A BUPATI OGAN KOMERING ILIR

  
ISKANDAR

9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus.	Penderita Diabetes Melitus.	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa.	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat.	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Sesuai standar pelayanan kesehatan TB.	Orang dengan TB.	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV.	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan).	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.	100%

BUPATI OGAN KOMERING ILIR



**ISKANDAR**

# BAGIAN HUKUM

## SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

---

### NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Ogan Komering Ilir  
Dari : Kabag Hukum  
Tanggal : 23 Januari 2019  
Nomor : 81 /ND/II/2019  
Perihal : Mohon Penandatanganan Draft Peraturan Bupati OKI tentang " Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupten Ogan Komering Ilir".

---

Dengan hormat, bersama ini diataskan Draft Peraturan Bupati OKI dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang " Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupten Ogan Komering Ilir".

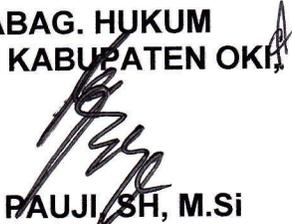
Setelah diteliti Bagian Hukum draft Peraturan ini telah sesuai dengan format materi dan tata naskah dinas serta pedoman yang ada, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. bahwa untuk menjamin tercapainya akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai sasaran dan prioritas pembangunan daerah bidang kesehatan, diperlukan pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan komering Ilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupten Ogan Komering Ilir;

Menurut Penelitian dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir, Draft Peraturan Bupati ini telah sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan menteri Dalam negeri nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2013 tentang Rencana Tata ruang wilayah Kabupaten Ogan komering Ilir Tahun 2013-2033, Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Disarankan kepada Bapak untuk menandatangani Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Tentang "Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupten Ogan Komering Ilir".

Demikian kami haturkan atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

**KABAG. HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKI**

  
**AGUS FAUJI, SH, M.Si  
NIP. 19640816 19890010**



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. Letnan Mukhtar Saleh No.085 Kayuagung 30611 Telp./Fax : 0712-321300  
Website : www.dinkes.kaboki.go.id Email : dinkesoki@yahoo.co.id

Kepada Yth.  
Kepala Bagian Hukum  
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir  
di-  
Kayuagung

**SURAT PENGANTAR**  
Nomor : 440/0681/DINKES/2019

No.	Jenis Surat/Barang yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk dapat diterbitkan

Kayuagung, 9 Januari 2019  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Ogan Komering Ilir,



**H. Muhamad Lubis, SKM, M.Kes**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19660603 198703 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. Letnan Mukhtar Saleh No.085 Kayuagung 30611 Telp./Fax : 0712-321300  
Website : [www.dinkes.kaboki.go.id](http://www.dinkes.kaboki.go.id) Email : [dinkesoki@yahoo.co.id](mailto:dinkesoki@yahoo.co.id)

Nomor : 440/0685/DINKES/2019  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Penerbitan -  
Surat Keputusan Bupati OKI

Kayuagung, 09 Januari 2019

Kepada Yth.  
Bupati Ogan Komering Ilir  
c.q. Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten OKI  
di-  
Kayuagung

Sehubungan dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, perlu di tetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehaatan dengan memuat 12 (dua belas ) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Selanjutnya dengan ini kami mohon kepada Bapak agar dapat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Demikian, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Ogan Komering Ilir,

**H. Muhamad Lubis, SKM, M.Kes**  
**Pembina Tk. I**

NIP. 19660603 198703 1 003